

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Depok : Rajawali Pers).
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya).
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta).
- Ary, Donal. 2002. *An Invitation to Research in Social Education*. (Baverly hills : Sage publication).
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung : Mandar Maju).
- Black, Donald. 1972. *The Boundaries of Legal Sociology*. *The Yale Law Journal*, Vol. 81 No. 6, Mei 1972.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. (Medan : Wal Ashri Publishing).
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta : FH UII Press).
- Iskandar, Nandan, Amelya Gustina, Dyah Kusumastuti, Fitri Agustina Siregar, Aghia Khumaessi Suud dan Irfan Fachrurrozi. 2017. *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum*. (Jakarta : Kejaksaan Agung Pusat Penelitian dan Pengembangan)
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN).
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Surabaya : Putra Harsa).
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya).

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press).
- Mulyadi, Lilik. 2020. *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Prodjotaruno, Kundiarto dkk. 2021. *Buku Panduan Desa Antikorupsi*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi).
- Tim Redaksi Media Hukum. 2004. *Pemberantasan Korupsi pada Era Otonomi Daerah Edisi Kedua*. (Jakarta : Media Hukum).
- Santoso, Ibnu. 2011. *Memburu Tikus-tikus Otonom*. (Jakarta: Gava Media).
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Syafrinaldi. 2016. *Proses Pengembalian Kerugian Negara akibat Korupsi*. (Yogyakarta: Genta Publising).
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama).
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika).

B. JURNAL

- Angkasa, Rili Windiasih dan Ogiandhafiz Juanda. 2021. Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021*.
- Appludnopsanji dan Pujiyono. 2020. Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal SASI, Volume 26 Nomor 4, Oktober - Desember 2020*.

- Atmojo, Eko Muhammad dkk. 2018. Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Bakhtiar, Maulana Yusuf Fransisca Romana Harjiyatni, Hartanti. 2022. Aktualisasi Perjanjian Kerjasama Antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Cirebon). *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum Volume 6 (No.2): ISSN 2598-2435*.
- Herdiana, Dian. Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol. 3 (1) (2019): 1-11, Jakarta, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri*.
- Hiariej, Eddy O.S. 2013. Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masalah-masalah Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jilid 42 No. 1 Januari 2013*.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2018. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*. Jakarta, dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_k_kasus_korupsi_2018.pdf, pada tanggal 31 Agustus 2022.
- Kautsar, Izzy Al dan D.W. Muhammad. 2022. Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7 Nomor 2, 2022*.
- Kila, Kristina Korniti. 2016. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai. *Jurnal Administrasi Negara, Volume 5 Nomor 1*.
- Lesmana, CSA. Teddy. 2019. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1 2019*.
- Mahendra, Adam Prima. 2013. Mediasi Penal Dalam Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist Diction Volume 3 No. 4, Juli 2020*.

- Moho, Hasaziduhu. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi : 59 Januari/ ISSN : 1829-7463, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa.*
- Narindrani, Fuzi. Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 4 (2020), Jakarta, Badan Pengembangan Dan Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.*
- Pahlevi, Farida Sekti. 2022. Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.*
- Purnomo, Beja Suryo Hadi. 2018. Kedudukan Media Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indoneisa, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.*
- Rani, Febrina Hertika Luil Maknun. 2020. Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Juni 2020.*
- R, Mukhlis. 2012. Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1.*
- Rosalina, Iga. 2012. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol.01 No. 01.*
- Siregar, Nur Fitriyani. 2018. Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18, No.2.*
- Waluyo, Bambang. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014.*

C. ARTIKEL/INTERNET

- Ahdiat, Adi. 2020. *ICW: Pemerintah Kabupaten, Paling Korup Sepanjang 2019.* <https://kbr.id/nasional/02-2020/icw-pemerintah-kabupaten-sembaga-paling-korup-sepanjang-2019/102333.html/>, pada tanggal 31 Agustus 2022.

- Alkostar, Artidjo. 2013. *Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime* dari <http://e-pushamuii.org/content/3-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime/>. pada tanggal 21 November 2022.
- Anas, Anwar. 2020. *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, Owntalk.co.id. <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, pada tanggal 22 Agustus 2022.
- Ardianto, Yoni. 2019. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Artikel DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 6 Maret 2019, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, pada tanggal 22 Agustus 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. 2000. *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, pada tanggal 23 September 2022.
- Hayati, Rina. 2020. *Pengertian Data Sekunder, Kelebihan, Kekurangan, dan contohnya*, PenelitianIlmiah.com. <https://penelitianilmiah.com/data-sekunder/>, pada tanggal 22 Agustus 2022.
- Ningtyas, Ika. 2019. *Benarkah 900 Kades Terjerat Korupsi Dana Desa?*. Tempo, pada tanggal 15 Agustus 2022.
- Populix. 2021. *Pengertian Data Primer dan Perbedaannya Dengan Data Skunder*. info.populix.co, Jakarta. <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, diakses 10 Agustus 2022.
- Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2022. *KPK Ajari Ribuan Kades di Jateng Perangi Korupsi*, <https://jatengprov.go.id/publik/kpk-ajari-ribuan-kades-di-jateng-perangi-korupsi/>, pada tanggal 21 November 2022.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. 2022. *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini*, Pusat Edukasi Antikorupsi. 24 Mei 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, pada tanggal 20 Februari 2023.
- Saimima, Ika Dewi Sartika dkk.. 2021. *Mediasi Penal Dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Simbur Raya Universitas Sriwijaya*, <http://repository.ubharajaya.ac.id/9937/1/Mediasi%20Penal.pdf#> diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

Tim Hukum online. 2022. *Fungsi Hukum Menurut Para Ahli*, *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2/>, pada tanggal 16 Januari 2022.

D. TESIS/DISERTASI

Indri, Astuti. 2015. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)*. Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rohcahyanto, Fitroh. 2018. *Disertasi: Memperdagangkan Pengaruh (trading in influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*.

E. KAMUS

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, pada tanggal 23 Agustus 2022.

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.